



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MENDRA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 979693

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	230.000.000
1.	Tanah Seluas 600 m ² di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI	Rp. 80.000.000	
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 300 m ² /160 m ² di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI	Rp. 150.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	23.000.000
1.	MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp. 6.000.000	
2.	MOTOR, HONDA REVO Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp. 2.000.000	
3.	MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI	Rp. 15.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	---
D. SURAT BERHARGA		Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	3.580.000
F. HARTA LAINNYA		Rp.	---
Sub Total		Rp.	256.580.000
III. HUTANG		Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	256.580.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.